KATALOG: 7102025.1706

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

2022

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUKOMUKO

https://mukomukokab.bps.go.id

KATALOG: 7102025.1706

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

2022

https://mukomukokab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUKOMUKO

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022

Nomor ISSN :
Nomor Publikasi : 17060.2326
Katalog BPS : 7102025.1706
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xi + 44 halaman

Naskah:
BPS Kabupaten Mukomuko

Penyunting:
BPS Kabupaten Mukomuko

Gambar Kulit dan *Lay Out*:
BPS Kabupaten Mukomuko

Diterbitkan Oleh:
©BPS Kabupaten Mukomuko

Dicetak Oleh:
BPS Kabupaten Mukomuko

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

https://mukomukokab.bps.go.id

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN MUKOMUKO 2022

Tim Penyusun

Penanggung Jawab	: Dwi Yogo Supriyanto, S.ST, M.E
Penulis Naskah	: Damar Jaluprakasa, S.Tr.Stat
Pengolah Data	: Damar Jaluprakasa, S.Tr.Stat
Penyunting	: Sapta Apriyenti, S.P
Gambar Kulit	: Damar Jaluprakasa, S.Tr.Stat
Pemeriksa Tabel	: Sapta Apriyenti, S.P

https://mukomukokab.bps.go.id

https://mukomukokab.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Tahun 2022 Kabupaten Mukomuko merupakan hasil kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko sebagai publikasi lanjutan tahun sebelumnya. IKK Tahun 2022 adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi Kabupaten Mukomuko dibandingkan kota acuan (Kota Makassar), yang merupakan salah satu komponen utama untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022.

Data diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di Kabupaten Mukomuko. Data dihitung berdasarkan data harga triwulanan bulan Juli 2021, Oktober 2021, Januari 2022, dan April 2022.

Terima kasih kepada semua pihak, semoga publikasi ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan para pengguna data. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan pada publikasi ini di masa yang akan datang.

https://mukokab.bps.go.id

Mukomuko, Desember 2023
Kepala BPS Kabupaten Mukomuko

Dwi Yogo Supriyanto, S.ST, M.E
NIP. 19820329 200412 1 001

https://mukomukokab.bps.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Katalog	ii
Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	5
Bab II. Metodologi	7
2.1 Ruang Lingkup dan Sumber Data	9
2.2 Pemilihan Responden	10
2.3 Pemilihan Kualitas	11
2.4 Metode Pengumpulan Data	11
2.5 Konsep dan Definisi	11
2.6 Metode Penghitungan IKK	15
2.7 Penghitungan Diagram Timbang IKK 2022	17
2.8 Metode Analisis	21
Bab III. Pembahasan	23
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Mukomuko	25
3.2 Gambaran Kependudukan	28
3.3 Gambaran Transportasi dan Infrastruktur Jalan	29
3.4 Alokasi DAU Kabupaten Mukomuko	32
3.5 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Mukomuko Tahun 2022	34
Lampiran	39

https://mukomukokab.bps.go.id

https://mukomukokab.bps.go.id

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Luas dan Rata-rata Ketinggian Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2022.....	27
Tabel 2.	Panjang Jalan Negara, Provinsi, Kabupaten Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 (km)	30
Tabel 3.	Realisasi Penerimaan Daerah (Rp 000.000) Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Mukomuko, 2020-2021	33
Tabel 4.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022.....	36

https://mukomukokab.bps.go.id

https://mukomukokab.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Peta Wilayah Kabupaten Mukomuko.....	25
Gambar 2.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mukomuko (km^2) Tahun 2022	27
Gambar 3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2022.....	28
Gambar 4.	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2022.....	29
Gambar 5.	Persentase Jalan Berdasarkan Tingkat Pemerintah yang Berwenang di Kabupaten Mukomuko Tahun 2022	31
Gambar 6.	Persentase Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2022	31
Gambar 7.	Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2022	31
Gambar 8.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022	36

https://mukomukokab.bps.go.id

https://mukomukokab.bps.go.id

BAB 1
PENDAHULUAN

https://mukomukokab.bps.go.id

https://mukomukokab.bps.go.id

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah selama ini diarahkan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan melakukan berbagai pembangunan fisik maupun non fisik yang tersebar sampai pelosok wilayah yang sekaligus secara bertahap mengurangi kemiskinan. Pembangunan fisik yang tersebar diharapkan dapat membawa perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara merata. Pembangunan fisik berupa gedung-gedung perkantoran, tempat ibadah maupun tempat untuk kegiatan sosial masyarakat di berbagai bidang terus mengalami perkembangan yang dinamis sesuai dengan gerak roda perekonomian daerah.

Kebijakan Otonomi Daerah (Otda) sejak 1 Januari 2001 yang dilandasi oleh Undang Undang No. 22 Tahun 1999 mengandung isi bahwa sebagian besar urusan pemerintahan pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah masing-masing. Kewenangan ini diatur dalam Undang Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan Otda adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, kebutuhan fiskal yang dianggarkan melalui DAU dihitung berdasarkan kesenjangan fiskal antar daerah, dimana kesenjangan fiskal merupakan selisih antara potensi dan kebutuhan daerah. Indikator-indikator pokok kebutuhan daerah dalam penghitungan DAU adalah Indeks Jumlah Penduduk (IP), Indeks Luas Wilayah (IW), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks PDRB perkapita (IPP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

DAU merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah. Azas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang mendasari penghitungan DAU memerlukan

https://mukomukokab.bps.go.id

dukungan data. Data yang diperlukan dengan sendirinya haruslah mempunyai beberapa persyaratan, yaitu kaitannya yang sangat tinggi dengan tujuan pembangunan itu sendiri, mempunyai kredibilitas yang tinggi, mutakhir, dan mempunyai validitas dan akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga pembagian DAU ke daerah dapat menjadi adil, proporsional, dan merata.

Dalam formulasi DAU, salah satu variabel yang dibutuhkan adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). IKK adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan Harga Bahan Bangunan/Konstruksi (TKK) antarwilayah. Bangunan/konstruksi sebagai bentuk pembangunan fisik, seperti bangunan gedung, jalan, jembatan, irigasi, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah. Pembangunan ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Mukomuko. Namun, kondisi geografis menyebabkan perbedaan pembiayaan untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut.

IKK pertama kali dihitung Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2002 untuk keperluan penghitungan DAU 2003 yang kemudian dilanjutkan hingga sekarang, yakni IKK tahun 2022 yang akan digunakan untuk penghitungan DAU Tahun 2023. Peranan BPS Kabupaten/Kota dalam hal ini BPS Kabupaten Mukomuko selain dalam pengumpulan data dari lapangan untuk penghitungan IKK juga berperan untuk mensosialisasikan pentingnya data IKK kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Dengan demikian, data tersebut dapat memberi manfaat yang optimal bagi Pemerintah Kabupaten Mukomuko khususnya dalam penetapan nilai/biaya suatu bangunan konstruksi.

https://mukomukokab.bps.go.id

1.2. Tujuan

1. Memberikan gambaran komponen-komponen penyusun Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Mukomuko Tahun 2022.
2. Mengetahui besarnya nilai IKK Kabupaten Mukomuko Tahun 2022.
3. Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan daerah dan pembangunan daerah oleh para *stakeholder.*

https://mukomukokab.bps.go.id

https://mukomukokab.bps.go.id

BAB 2
METODOLOGI

https://mukomukokab.bps.go.id

https://mukomukokab.bps.go.id

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menggambarkan tingkat perbandingan harga barang konstruksi antar wilayah. Untuk menghitung IKK diperlukan beberapa data, yaitu: harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat berat konstruksi, upah jasa konstruksi, dan bobot/diagram timbang.

2.1. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Kegiatan pengumpulan data untuk penghitungan IKK mencakup:

1. Data harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat-alat berat konstruksi, dan upah jasa konstruksi yang meliputi upah kepala tukang, upah tukang batu, upah tukang kayu, upah instalatir listrik, dan upah pembantu tukang didapat dari Survei Harga Kemahalan Konstruksi (HKK) Tahun 2022. Survei HKK dalam rangka penghitungan IKK tahun 2022 tersebut dilakukan dalam 4 periode pencacahan yaitu setiap tanggal 20 s.d 30 pada bulan Juli 2021, Oktober 2021, Januari 2022, dan April 2022. Seperti halnya tahun sebelumnya, Survei HKK tahun 2022 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi. Untuk kuisioner yang digunakan dalam Survei HKK 2022 masih menggunakan kuisioner Survei HKK 2021.
2. IKK tahun 2022 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* yaitu menggunakan *updating* BoQ tahun 2021. BoQ adalah realisasi pembangunan suatu konstruksi di kabupaten/kota yang bersangkutan. Realisasi pembangunan berupa nilai masing-masing bahan bangunan utama yang dibutuhkan untuk membangun 1 unit bangunan per satuan ukuran luas dari 5 jenis bangunan yang ditentukan. Kelima jenis bangunan ini yaitu: bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal; bangunan pekerjaan umum untuk pertanian; bangunan pekerjaan

https://mukomukokab.bps.go.id

umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan; bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi; serta bangunan lainnya.

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan angka IKK adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan BPS diperoleh melalui responden Survei HKK yaitu pedagang grosir yang menjual bahan bangunan, jasa persewaan alat berat, kontraktor, dan Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU). Sedangkan data sekunder berasal dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko berupa data Realisasi APBD 2022 sebagai salah satu penimbang IKK dimana setiap tahun IKK Kabupaten Mukomuko relatif berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD.

https://mukomukokab.bps.go.id

2.2. Pemilihan Responden

Responden Survei HKK adalah pedagang grosir yang menjual bahan bangunan, usaha penyewaan alat berat, kontraktor dan Dinas Pekerjaan Umum. Data yang dikumpulkan dari pedagang grosir adalah: harga bahan bangunan, sedangkan yang diperoleh dari usaha penyewaan alat berat, kontraktor, dan Dinas Pekerjaan Umum adalah data harga sewa alat berat dan upah jasa konstruksi. Pemilihan responden dilakukan secara purposif di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Khusus untuk mengumpulkan data harga bahan bangunan yang diutamakan adalah pedagang grosir yang ada di wilayah bersangkutan. Jika tidak ada pedagang grosir, maka dipilih responden dengan skala prioritas yaitu: produsen, pedagang campuran (pedagang grosir sekaligus melayani eceran), baru kemudian pedagang eceran. Jumlah responden yang diambil untuk setiap kualitas barang terpilih adalah 3 responden.

Lokasi responden Survei HKK harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Pengecualian dikhususkan untuk barang-barang natural seperti: pasir, batu pondasi, batu split, batu bata, batako, dan kusen. Pencacahan barang tersebut boleh dari produsen yang tidak berada di ibukota kabupaten/kota.

Barang-barang ini tidak harus *ready stock*. Diusahakan responden sama untuk setiap periode pencacahan. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai.

2.3. Pemilihan Kualitas

Agar hasil pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan seperti yang terdapat dalam kuesioner pencacahan Survei HKK (VIKK2022), maka perlu dilakukan pemilihan barang dan kualitas sebagai berikut:

1. Spesifikasi/kualitas barang dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merek barang yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan maka cari kualitas yang setara.
2. Jenis barang yang dicatat harganya merupakan barang *ready stock*, harus benar-benar diperdagangkan di kabupaten/kota itu sendiri kecuali untuk barang-barang natural. Pencacahan harga untuk barang-barang natural (pasir, batu pondasi, batu split, batu bata, batako, dan kusen) tidak harus *ready stock*.

https://mukomukokab.bps.go.id

2.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Survei HKK dilakukan dengan wawancara langsung terhadap responden menggunakan kuesioner VIKK2022. Jika tidak memungkinkan dilakukan wawancara secara langsung maka kuesioner dapat ditinggal untuk diisi sendiri oleh responden. Pencacahan dilakukan setiap tanggal 20 s.d 30 pada bulan Juli 2021, Oktober 2021, Januari 2022, dan April 2022.

2.5. Konsep dan Definisi

Beberapa istilah dan konsep dalam Kuesioner Survei HKK 2022 (VIKK2022) adalah sebagai berikut:

1. **Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK)** merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk

membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi. TKK diperoleh melalui pendekatan terhadap harga sejumlah bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam bangunan tersebut.

2. **Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)** adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan TKK suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK kabupaten/kota atau provinsi lain. Sesuai dengan pengertiannya, IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk wilayah yang berbeda pada periode waktu tertentu. Berbeda dengan pengertian indeks periodikal atau temporal yang selama ini sudah kita kenal, seperti Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) atau Indeks Harga Konsumen (IHK), kedua indeks harga tersebut menggambarkan perkembangan harga di suatu wilayah pada periode waktu tertentu terhadap harga periode tahun dasar.
3. **Harga perdagangan besar (HPB)** adalah harga transaksi yang sudah terjadi antara pedagang grosir sebagai penjual dengan pedagang besar berikutnya sebagai pembeli secara party/grosir di pasar atas suatu barang.
4. **Harga produsen** adalah harga transaksi yang sudah terjadi antara produsen sebagai penjual dengan pedagang besar/distributor sebagai pembeli secara party/grosir di pasar pertama atas suatu barang.
5. **Harga eceran** adalah harga transaksi yang sudah terjadi antara pedagang sebagai penjual dengan rumah tangga sebagai pembeli yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga langsung, bukan untuk ditransaksikan lagi atas suatu barang.

https://mukomukokab.bps.go.id

6. **Bahan bangunan/konstruksi** adalah material yang digunakan dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan pada bagian suatu bangunan/konstruksi yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut.
7. **Produsen** adalah pembuat/penghasil material baik dilakukan secara manual maupun dengan bantuan peralatan/ mesin.
8. **Pedagang grosir** adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain atau kontraktor bangunan secara grosir.
9. **Pedagang campuran** adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain, kontraktor bangunan, dan rumah tangga baik secara grosir maupun eceran.
10. **Pedagang eceran** adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada rumah tangga secara eceran.
11. **Kegiatan konstruksi** adalah suatu kegiatan meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang dimaksud dalam survei ini adalah hanya kegiatan investasi (pembangunan baru, bukan renovasi yang tidak menambah nilai aset). Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi.
12. **Harga sewa alat berat konstruksi** adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu. Satuan/unit yang

https://mukomukokab.bps.go.id

digunakan dalam harga sewa ini adalah 1 bulan atau 200 jam. Harga sewa hanya biaya sewa alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek, biaya jasa operator, dan biaya bahan bakar. Umur alat berat yang disewakan juga memiliki batas maksimal yaitu 8 tahun.

13. ***Hydraulic Excavator*** adalah suatu mesin alat berat yang berfungsi untuk menggali tanah dan menuangkannya ke tempat lain.
14. ***Bulldozer/Tracked Tractor*** adalah alat berat yang berfungsi untuk menggusur/memindahkan (mendorong) tanah dalam jarak pendek.
15. ***Skid Steer Loader*** adalah sebuah *loader* dengan *frame body* kecil yang kaku dan kuat, mesin yang bertenaga dengan *lift arm* (lengan angkat) yang digunakan untuk memasang berbagai *tools* (peralatan) dan tambahan lainnya.
16. ***Tandem Vibrating Roller*** adalah mesin penumbuk/pemadat jalan tipe tandem dengan penggerak roda belakang. Peralatan dilengkapi dua roda *cylindrical steel wheel* (roda baja) dengan ukuran sama dan perangkat vibrator, sehingga alat ini juga berfungsi sebagai *compactor.*
17. ***Compact Track Loader*** adalah alat berat beroda karet, hanya mampu beroperasi di daerah yang keras dan rata.
18. ***Dump truck*** adalah kendaraan angkut jarak jauh mempunyai bak angkut yang diungkit secara hidrolik untuk menurunkan muatannya.
19. **Balas Jasa Konstruksi** adalah upah/gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada tenaga kerja di bidang konstruksi tiap satuan/unit orang/hari (OH). Tunjangan lainnya yang dimaksud adalah semua pendapatan yang diterima oleh tenaga sektor konstruksi yang berupa makanan, perumahan/penginapan, jaminan sosial, dan sebagainya.

https://mukomukokab.bps.go.id

20. **Mandor** adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya proyek dan berkoordinasi dengan kepala tukang. Pada pekerjaan yang lebih kecil, mandor merangkap kepala tukang.
21. **Kepala tukang** adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas mengawasi dan membimbing buruh konstruksi untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan.
22. **Tukang batu** adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas untuk memasang batu kali, batu bata, ubin, dan membuat plester tembok. Alat kerja yang digunakan biasanya adalah cetok, mal, dan waterpass.
23. **Tukang kayu** adalah buruh konstruksi yang mempunyai tugas untuk membuat struktur bangunan dari kayu dan alat kerja yang digunakan biasanya adalah serut, gergaji, bor, pahat, dll.
24. **Tukang listrik** adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas memasang instalasi listrik dan perlengkapannya dan memasang sistem listrik generator, trafo, dll.
25. **Upah pembantu tukang** adalah buruh konstruksi yang mempunyai tugas untuk membantu semua pekerjaan konstruksi.

https://mukomukokab.bps.go.id

2.6. Metode Penghitungan IKK

Penghitungan IKK dibutuhkan beberapa komponen antara lain data harga konstruksi yang meliputi harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat-alat berat konstruksi, dan harga upah jasa konstruksi, dan data bobot/diagram timbangan IKK berupa volume/kuantitas masing-masing bahan bangunan utama yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas dari 5 (lima) kelompok jenis bangunan.

Data dasar yang digunakan dalam penghitungan IKK kabupaten/kota adalah harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang diperoleh melalui Survei Harga Konstruksi serentak yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Adapun penimbangnya dari

realisasi APBD pembentukan barang modal bangunan, dengan sistem dan komponen yang diambil dari *Bill of Quantity* (BoQ) kegiatan proyek yang sudah selesai (bukan RAB). Dimana tiap kabupaten/kota idealnya punya penimbang sendiri untuk tiap jenis bangunan. Pada tahun 2022 penimbang proyek dikumpulkan melalui survei Keuangan Pemda Tingkat II (K-II). Anggaran pengumpulan data penimbang yang sudah ada supaya digunakan untuk mengumpulkan data BoQ.

EKS digunakan ketika data harus lengkap, karena jika salah satu data kosong pada suatu komoditi maka komoditi tersebut tidak bisa digunakan karena tidak lengkap (rasio dengan bilangan 0). Pada Tahun 2012 metode penghitungan yang digunakan adalah EKS dengan formula:

$$\boldsymbol{P_{cd}} = \prod_{n \in N_c \cap N_d} \left[\frac{P_{nd}}{P_{nc}}\right]^{\frac{1}{n_{cd}}}$$

Sedangkan pada Tahun 2013 sampai sekarang menggunakan metoda *Country Product Dummy* (CPD) karena menghasilkan indeks dan standar errornya, yang akan sama dengan EKS jika data lengkap dalam logaritma model berbentuk linier:

$$\boldsymbol{P_{kn}} = \boldsymbol{a_k b_n u_{kn}}$$

$$\boldsymbol{ln\, p_{nc}} = \propto_k + \boldsymbol{\gamma_n} + \boldsymbol{Vkn}$$

Misalkan :

$\boldsymbol{P_{kn}}$ adalah komponen konstruksi n di kabupaten k (k=1, 2, ..., K; n=1, 2, ..., N)

$\boldsymbol{a_k}$ dan $\boldsymbol{b_n}$ adalah parameter yang akan diduga dari data harga

$\boldsymbol{u_{kn}}$ adalah random variabel yang berdistribusi identik dan independen, dengan asumsi bahwa random variabel ini berdistribusi lognormal atau log $\boldsymbol{P_{kn}}$ berdistribusi normal dengan mean 0 dan varian σ^2

Bila parameter $\boldsymbol{a_k}$ dinyatakan sebagai relatif harga konstruksi terhadap kabupaten yang dijadikan referensi, katakan Kabupaten X, maka $\boldsymbol{a_k}$ adalah harga konstruksi di Kabupaten K relatif terhadap 1 (satu), yaitu di Kabupaten X. Dengan kata lain harga konstruksi di Kabupaten K 'setinggi' $\boldsymbol{a_k}$ dibanding harga

https://mukomukokab.bps.go.id

konstruksi di Kabupaten X. Karenanya IKK di Kabupaten K dinyatakan sebagai $\boldsymbol{IKK_k = exp\ (a_k\ )}$. Persamaan tersebut dikalikan 100 sehingga perbandingan data dinyatakan dalam persen.

Data *Bill of Quantity* (BoQ) menjadi sangat penting, BoQ merupakan daftar item dan kuantitas pekerjaan yang penyusunan dan perhitungannya didasarkan atas gambar lelang, spesifikasi teknis, dan spesifikasi umum yang digunakan sebagai standar acuan bagi peserta lelang dalam mengajukan penawaran harga. BoQ yang dimaksud adalah BoQ yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Data BoQ yang dikumpulkan adalah realisasi pelaksanaan proyek menurut kelompok jenis bangunan pada tahun 2021, jika tidak ada pembangunan pada tahun 2021, maka BoQ yang dikumpulkan adalah pada tahun sebelumnya. Untuk menguraikan BoQ maka diperlukan analisa harga satuannya.

Pada penghitungan IKK tahun 2022, kota acuan yang digunakan untuk menghitung IKK masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu **Kota Makassar.**

https://mukomukokab.bps.go.id

2.7. Penghitungan Diagram Timbang IKK 2022

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC). Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga

konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah dan memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity* (BOQ).

Pendekatan BOCC didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni komponen gabungan dan input dasar. Selanjutnya untuk tujuan estimasi perbandingan antar wilayah, komponen-komponen tersebut dikelompokan dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam *basic heading*.

Sektor konstruksi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yang disebut sebagai *basic heading* antara lain:

Konstruksi gedung tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;

a. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas
b. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental.

Klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan;

1. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian
   a. Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendung (weir), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, check dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan viaduk.
   b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan.
   a. angunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.

https://mukomukokab.bps.go.id

b. Bangunan jalan dan jembatan kereta, pembangunan jalan, dan jembatan kereta.

c. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.

3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi

a. Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.

b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.

c. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.

d. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar *microwave*, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.

e. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.

f. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.

g. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.

h. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.

i. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

https://mukomukokab.bps.go.id

Klasifikasi bangunan lainnya, meliputi bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olah raga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan rangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

Komponen yang digunakan dalam penghitungan diagram timbang IKK 2021 berbeda antar klasifikasi jenis bangunan. Sistem konstruksi pada bangunan rumah dan gedung berbeda dengan klasifikasi jenis bangunan lainnya. Sistem menurut konsep pendekatan BOCC adalah suatu kumpulan komponen dalam suatu proyek konstruksi yang bisa menjalankan suatu fungsi tertentu. Sebuah komponen secara umum terdiri dari beberapa material, tenaga kerja dan peralatan, contohnya beton, pengecatan eksterior, pondasi kolom, dan lainnya.

https://mukomukokab.bps.go.id

Pendekatan BOCC menggunakan 3 sistem penimbang, yaitu:

1. W1 adalah penimbang yang digunakan pada level agregasi jenis bangunan seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, dan jaringan, dan bangunan lainnya.
2. W2 adalah penimbang untuk agregasi pada level sistem konstruksi.
3. W3 adalah penimbang untuk agregasi pada level komponen yang termasuk upah tenaga kerja dan sewa peralatan konstruksi.

Selain sistem penimbang dengan menggunakan pendekatan BOCC, untuk menghitung IKK juga menggunakan penimbang umum (W0) yang digunakan sebagai penghubung masing-masing jenis bangunan menjadi suatu kesatuan konstruksi. Penimbang umum berasal dari realisasi anggaran daerah tingkat II (kabupaten/kota) untuk pembangunan konstruksi yang diperoleh melalui survei Keuangan Pemda Tingkat II (K-II) dari Subdirektorat Keuangan dan

Teknologi Informasi dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dari data realisasi anggaran daerah tingkat II untuk pembangunan masing-masing jenis bangunan diperoleh bobot masing-masing jenis bangunan ke total konstruksi di kabupaten/kota yang bersangkutan.

2.8. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis kuantitatif yang digunakan untuk mempermudah analisis tabel-tabel dan grafik secara sederhana sehingga didapatkan gambaran mengenai perkembangan dari objek penelitian. Dalam publikasi ini, analisis tersebut digunakan untuk menginterpretasikan angka IKK Kabupaten Mukomuko, jika dibandingkan dengan angka IKK Kota Makassar sebagai kota acuan.

Beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam analisis IKK tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya, angka IKK disajikan menggunakan IKK rata-rata nasional sama dengan 100 yang kemudian dikalikan dengan suatu bilangan/inflator. IKK 2010 hingga IKK 2021 disajikan dengan model yang sama dengan IKK 2022 yaitu dengan menentukan salah satu ibukota provinsi, dimana terdapat satu kabupaten/kota dalam provinsi tersebut yang memiliki IKK mendekati angka rata-rata sebagai kota acuan atau provinsi acuan.
2. Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK adalah memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKK-nya dan literatur tentang indeks spasial pada umumnya mengacu pada satu wilayah tertentu sebagai dasar.

https://mukomukokab.bps.go.id

https://mukomukokab.bps.go.id

BAB 3
PEMBAHASAN

https://mukomukokab.bps.go.id

https://mukomukokab.bps.go.id

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Mukomuko

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Mukomuko

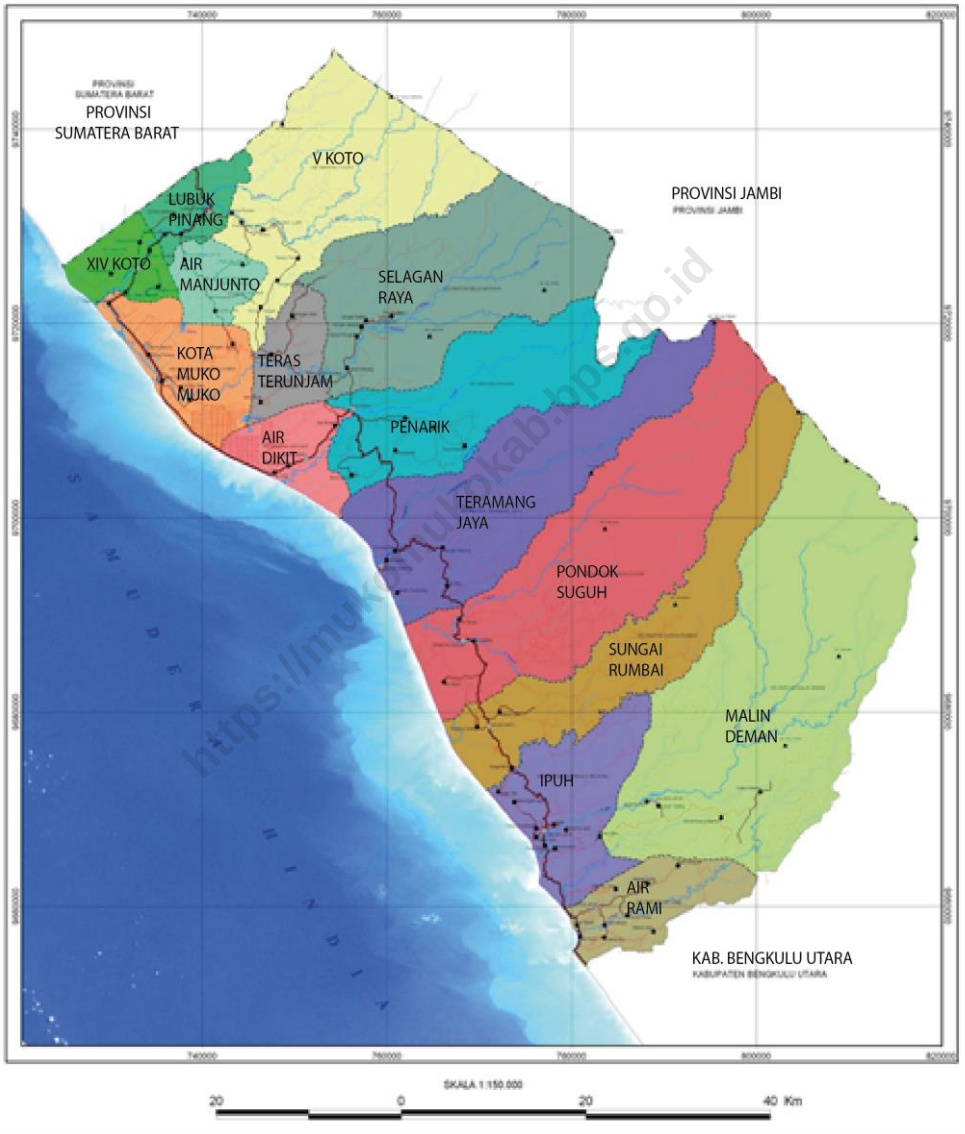

Kabupaten Mukomuko merupakan Kabupaten pecahan dari Kabupaten Bengkulu Utara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 03 Tahun 2003. Secara astronomis, Kabupaten Mukomuko terletak antara 101^0 01’ 36” – 101^0 51’ 08” Bujur Timur dan antara 02^0 16’ 06” – 03^0 07’ 08” Lintang Selatan.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Mukomuko berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan (Provinsi Sumatera Barat) di sebelah utara, Kabupaten Bengkulu Utara di sebelah selatan, Samudera Indonesia di sebelah barat, serta Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin (Provinsi Jambi) di sebelah timur.

Secara administrasi, Pemerintahan Kabupaten Mukomuko terbagi menjadi 15 kecamatan, yang terdiri dari 148 desa dan 3 kelurahan. Kota Mukomuko merupakan ibukota Kabupaten Mukomuko yang berjarak ± 270 km dari ibukota provinsi. Kabupaten Mukomuko terletak di sebelah paling utara Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah Kabupaten Mukomuko mencapai sekitar 4.146,52 kilometer persegi.

Kondisi geografis Kabupaten Mukomuko didominasi dataran rendah yang terdapat di bagian barat membujur searah pantai dari selatan ke utara, sedangkan di bagian timur topografinya berbukit-bukit terutama wilayah Kecamatan Malin Deman, Kecamatan Teras Terunjam, Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan V Koto, dan Kecamatan Air Manjunto. Ketinggian wilayahnya berkisar antara 0 – 180 m di atas permukaan laut.

Musim yang terjadi di Kabupaten Mukomuko sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia dikenal dua musim, yaitu musim hujan (Oktober – Maret) dan musim kemarau (April – September). Sementara pada bulan Februari-Maret dan Agustus-September merupakan masa peralihan/pancaroba. Sungai induk di kabupaten ini adalah Sungai Manjunto, Sungai Selagan, Sungai Air Dikit, Sungai Air Bantal, Sungai Teramang, dan Sungai Air Ipuh.

https://mukomukokab.bps.go.id

Gambar 2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mukomuko (km²) Tahun 2022

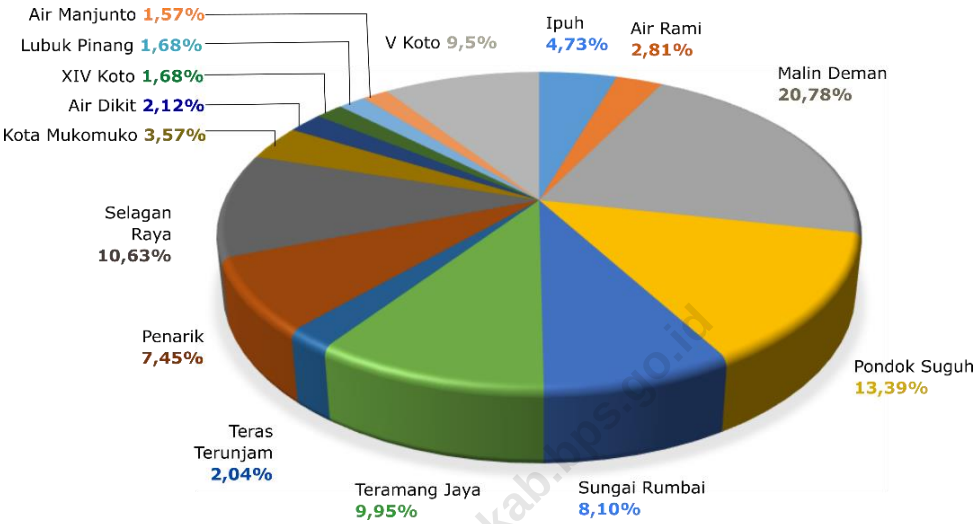

Tabel 1. Luas dan Rata-rata Ketinggian Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2022

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km²)	Tinggi Wilayah (meter)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ipuh	Medan Jaya	195,99	46,00
2. Air Rami	Arga Jaya	116,42	75,00
3. Malin Deman	Talang Arah	861,79	57,00
4. Pondok Suguh	Pondok Kandang	555,11	11,00
5. Sungai Rumbai	Gajah Mati	335,97	17,00
6. Teramang Jaya	Pasar Bantal	412,55	16,00
7. Teras Terunjam	Teras Terunjam	84,60	17,00
8. Penarik	Lubuk Mukti	308,87	83,00
9. Selagan Raya	Sungai Ipuh	440,95	51,00
10. Kota Mukomuko	Pasar Mukomuko	148,07	2,00
11. Air Dikit	Dusun Baru V Koto	87,89	19,00
12. XIV Koto	Lubuk Sanai	69,86	9,00
13. Lubuk Pinang	Lubuk Pinang	69,51	32,00
14. Air Manjunto	Manjunto Jaya	65,24	20,00
15. V Koto	Lalang Luas	393,72	41,00

Sumber : Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Sekda Kabupaten Mukomuko)

https://mukomukokab.bps.go.id

Berdasarkan Gambar 2 dan Tabel 1 dapat dilihat bahwa Kecamatan Malin Deman merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terluas, yaitu 861,79 km^2, yaitu 20,78 persen dari luas Kabupaten Mukomuko. Sedangkan Kecamatan Air Manjunto merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil, yaitu 65,24 km^2, yaitu 1,57% dari luas Kabupaten Mukomuko.

3.2. Gambaran Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Mukomuko pada tahun 2022 mencapai 196.749 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Penarik, yaitu sejumlah 25.309 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Malin Deman, yaitu sejumlah 7.028 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Mukomuko sekitar 45,94 jiwa/km^2. Hal ini berarti bahwa setiap 1 km^2 terdapat 47-48 penduduk yang menghuni. Gambaran kependudukan beserta rasio jenis kelamin berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada gambar 3 dan 4.

https://mukomukokab.bps.go.id

Gambar 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2022

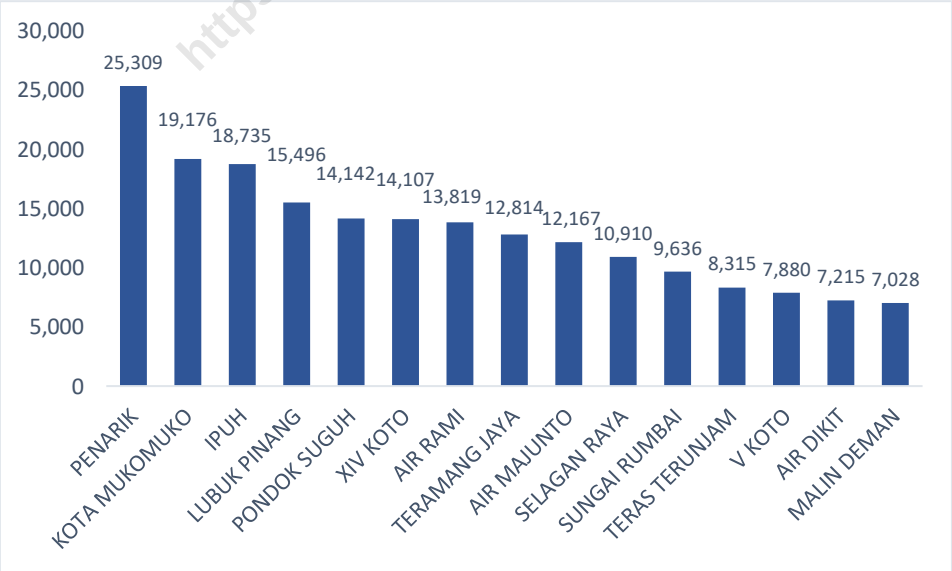

Sumber : Proyeksi Sensus Penduduk 2020

Gambar 4. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2022

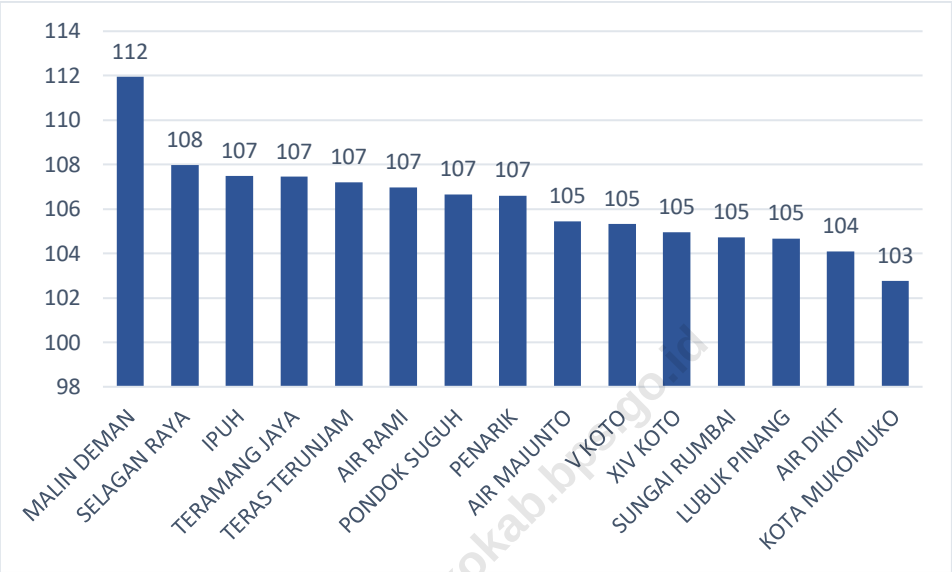

Sumber : Proyeksi Sensus Penduduk 2020

https://mukomukokab.bps.go.id

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki – laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Kecamatan Malin Deman merupakan kecamatan dengan perbandingan pria dan wanita tertinggi, yaitu sebesar 112. Artinya, terdapat 112 penduduk laki – laki per 100 penduduk perempuan. Sebaliknya, Kecamatan Kota Mukomuko merupakan kecamatan dengan rasio jenis kelamin terendah, yaitu sebesar 103 yang artinya terdapat 103 penduduk laki – laki per 100 penduduk perempuan.

3.3. Gambaran Transportasi dan Infrastruktur Jalan

Indeks Kemahalan konstruksi (IKK) dihitung dengan mengumpulkan sejumlah harga komoditi di bidang konstruksi. Salah satu hal yang berpengaruh dalam membentuk harga di suatu wilayah antara lain ketersediaan barang dan jasa dan kelancaran pendistribusian barang ke wilayah tersebut. Untuk

mendukung kelancaran arus distribusi barang dan jasa diperlukan sarana penunjang berupa sarana transportasi maupun infrastruktur jalan.

Pada tahun 2022, panjang jalan di Kabupaten Mukomuko adalah sepanjang 937 km. Sebesar 16,33 persen atau 153 km merupakan jalan negara yang tanggung jawab dan wewenangnya dibawah Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan 10,38 persen atau 97,22 km merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam hal ini merupakan tanggung jawab Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah. Sementara sisanya 73,30 persen atau 686,78 km merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten.

Tabel 2. Panjang Jalan Negara, Provinsi, Kabupaten Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 (km)

Jenis Jalan	Tingkat Pemerintah yang Berwenang			Total
	Negara	Provinsi	Kabupaten	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Permukaan				
a. Diaspal	153,00	97,22	271,44	521,66
b. Kerikil	-	-	318,69	318,69
c. Tanah	-	-	69,03	69,03
d. Lainnya	-	-	27,62	27,62
Total	**153,00**	**97,22**	**686,78**	**937,00**
Kondisi Jalan				
a. Baik	152,78	65,07	235,77	453,62
b. Sedang	-	-	50,30	50,30
c. Rusak	0,225	0,45	223,98	224,65
d. Rusak Berat	-	31,70	176,73	208,43
Total	**153,00**	**97,22**	**686,78**	**937,00**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko

https://mukomukokab.bps.go.id

Gambar 5. Persentase Jalan Menurut Tingkat Pemerintah yang Berwenang di Kabupaten Mukomuko Tahun 2022

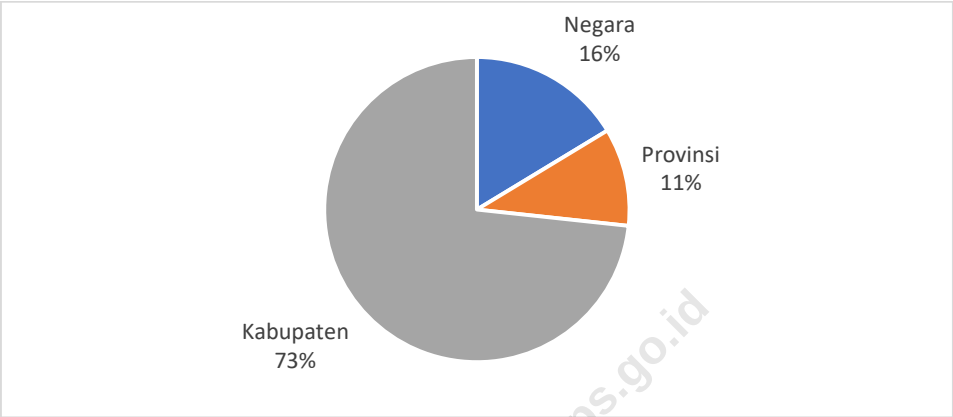

Gambar 6. Persentase Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2022

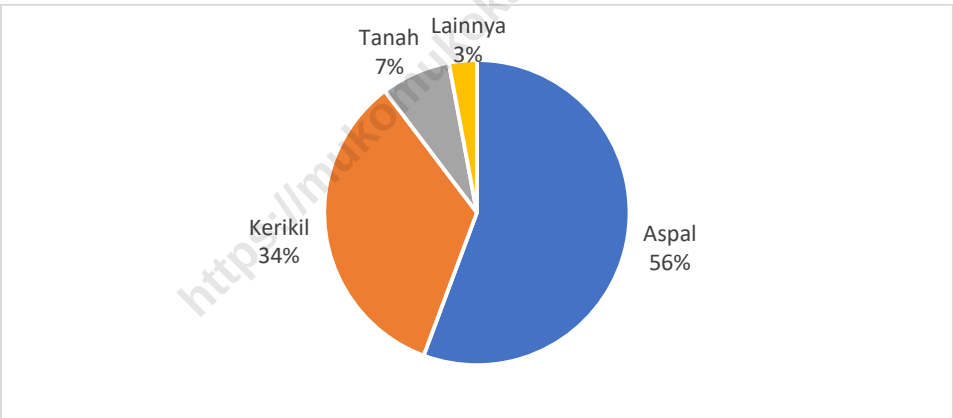

https://mukomukokab.bps.go.id

Gambar 7. Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2022

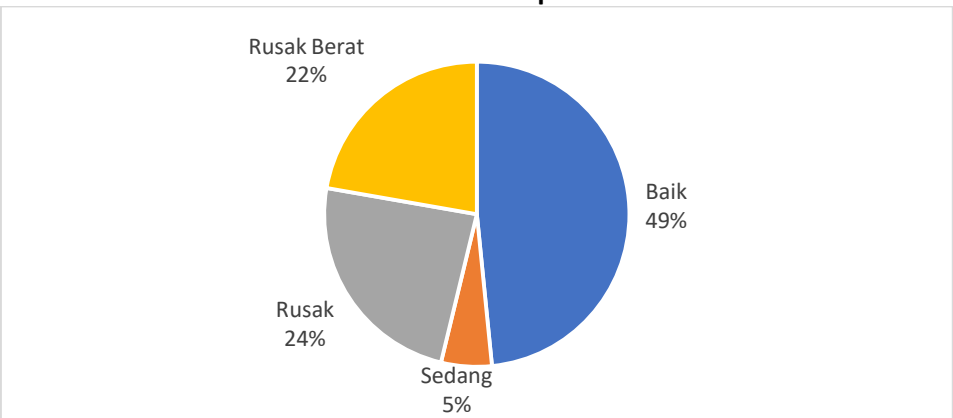

Berdasarkan jenis permukaannya, dari total 937 km panjang jalan kabupaten di Kabupaten Mukomuko, 521,66 km (55,67 persen) merupakan jalan diaspal, 318,69 km (34,01 persen) merupakan jalan kerikil, 69,03 km (7,37 persen) merupakan jalan tanah, 27,62 km (2,95) merupakan jenis lainnya. Sedangkan bila melihat kondisi jalan di Kabupaten Mukomuko, terdapat jalan sepanjang 453,62 km (48,41 persen) berkondisi baik, 50,3 km (5,37 persen) berkondisi sedang, 224,65 km (23,98 persen) berkondisi rusak, dan 208,43 km (22,24 persen) berkondisi rusak berat.

3.4. Alokasi DAU Kabupaten Mukomuko

Alokasi DAU bagi tiap daerah sangat penting sebagai salah satu sumber penerimaan yang akan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan tiap daerah. Diharapkan ke depannya DAU dapat dialokasikan secara proporsional kepada tiap daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan belanja daerah, agar pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Semakin besar IKK menunjukkan relatif semakin sulit memperoleh bahan bangunan/konstruksi di suatu wilayah dan relatif semakin tinggi harga bahan bangunan/konstruksi di wilayah tersebut. Harga bahan bangunan/kontruksi dan harga sewa alat berat di suatu daerah dipengaruhi oleh letak geografis dan kemampuan daerah tersebut dalam menyuplai bahan bangunan secara independen.

https://mukomukokab.bps.go.id

Tabel 3 Realisasi Penerimaan Daerah (Rp 000.000) Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Mukomuko, 2020–2021

Jenis Penerimaan	2020	2021
(1)	(2)	(3)
1. Pendapatan Asli Daerah(PAD)	**42 527,73**	**55 444,64**
a. Pajak Daerah	11 550,48	14 174,33
b. Retribusi Daerah	1 711,55	2 004,61
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 222,96	3 644,27
d. Lain-lain PAD yang Sah	26 042,73	35 621,43
2. Dana Perimbangan	**629 108,61**	**610 099,16**
a. Dana Bagi Hasil (DBH)	15 055,39	38 797,26
b. Dana Alokasi Umum (DAU)	3 856,65	452 497,93
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	457 001,33	49 109,80
d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	153 195,23	69 694,17
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	**70 556,40**	**188 568,58**
a. Dana Bagi Hasil Pajak Prov.	12 655,41	39 798,53
b. Dana Insentif Daerah	21 367,40	25 714,26
c. Dana Desa dari APBN	36 533,58	123 055,79
Jumlah-*Total*	**742 192,74**	**854 112,38**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko

https://mukomukokab.bps.go.id

Pembiayaan pembangunan berasal dari dua sumber, yaitu Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran penerimaan pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah. Realisasi penerimaan pemerintah Kabupaten Mukomuko tahun 2022 adalah sebesar Rp 854,11 miliar. Sebagian besar realisasi penerimaan tersebut yakni sebesar 6,49 persen diperoleh dari PAD, 71,43 persen berasal dari dana perimbangan, dan 22,08 persen berasal dari pendapatan daerah yang sah.

Kebutuhan akan keuangan daerah menjadi suatu syarat pembangunan fisik dapat berjalan lancar. Dengan kondisi Kabupaten Mukomuko yang merupakan kabupaten pemekaran yang belum lama berdiri sudah selayaknya pemerintah daerah untuk dapat mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri serta sumber keuangan lain seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

https://mukomukokab.bps.go.id

3.5. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Mukomuko Tahun 2022

Kebijakan Otonomi Daerah (Otda) yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan melakukan pembangunan secara merata dan adil agar tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah tersebut dibutuhkan dana perimbangan antara lain adalah Dana Alokasi Umum. Salah satu komponen utama yang digunakan untuk menghitung Dana Alokasi Umum adalah IKK. Dengan demikian IKK tahun 2022 merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023.

Dalam sejarah metodologi penghitungan IKK pada tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya, angka IKK disajikan menggunakan IKK rata-rata nasional sama dengan 100 yang kemudian dikalikan dengan suatu bilangan/inflator. Kemudian sejak tahun 2010 hingga sekarang, angka IKK disajikan dengan model yang berbeda yaitu dengan menentukan salah satu ibukota provinsi, dimana terdapat satu kabupaten/kota dalam provinsi tersebut memiliki IKK mendekati angka rata-rata sebagai kota acuan atau provinsi acuan. Petimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK adalah memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKK-nya dan literatur tentang indeks spasial pada umumnya mengacu pada satu wilayah tertentu sebagai dasar. Kota acuan yang dipakai pada penghitungan IKK tahun 2022 ini sama dengan tahun sebelumnya yakni Kota Makassar.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Mukomuko pada tahun 2022 mencapai 95,60 dengan Kota Makassar sebagai acuan. Angka IKK Kabupaten Mukomuko kurang dari 100 yaitu 4,40 poin ini menginterpretasikan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di Kabupaten Mukomuko lebih murah 4,40% dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di Kota Makassar sebagai kota acuan.

https://mukomukokab.bps.go.id

Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1701	Kab Bengkulu Selatan	95,69
2.	1702	Kab Rejang Lebong	95,47
3.	1703	Kab Bengkulu Utara	95,55
4.	1704	Kab Kaur	97,40
5.	1705	Kab Seluma	96,07
6.	**1706**	**Kab Mukomuko**	**95,60**
7.	1707	Kab Lebong	95,86
8.	1708	Kab Kepahiang	93,69
9.	1709	Kab Bengkulu Tengah	95,44
10.	1771	Kota Bengkulu	95,79

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

https://mukomukokab.bps.go.id

Gambar 8. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022

Dapat dilihat dari Gambar 8, angka IKK Kabupaten Mukomuko tahun 2022 merupakan yang cukup rendah dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi

Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa jika dibandingkan biaya untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu maka membangun satu unit bangunan di Kabupaten Mukomuko memerlukan biaya ketiga termahal. Dengan kata lain, Kabupaten Mukomuko merupakan kabupaten termurah ke-5 untuk membangun satu unit bangunan di Provinsi Bengkulu.

Di Provinsi Bengkulu, angka IKK terendah pada tahun 2022 dimiliki oleh Kabupaten Kepahiang yakni sebesar 93,69 dengan *range* IKK dengan Kabupaten Mukomuko sebesar 1,91 poin. Dengan melihat angka IKK Kabupaten Mukomuko dengan Kabupaten Kepahiang, dapat disimpulkan bahwa ditingkat kemahalan harga bangunan dari suatu nilai bangunan/biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di Kabupaten Mukomuko 1,91 kali lebih mahal jika dibandingkan dengan membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di Kabupaten Kepahiang.

Tingkat kemahalan konstruksi Kabupaten Mukomuko yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tersebut, karena pusat produksi dialihkan ke Provinsi Sumatera Barat. Hal ini memengaruhi distribusi barang atau besarnya tingkat kesulitan distribusi, sehingga beban biaya transportasi menjadi rendah dan harga barang menjadi murah. Untuk beberapa komoditi seperti tanah urug, pasir, batu pondasi, dan batu split dimana harga yang dicatat tanpa ongkos angkut.

https://mukomukokab.bps.go.id

https://mukomukokab.bps.go.id

LAMPIRAN

https://mukomukokab.bps.go.id

https://mukomukokab.bps.go.id

VHKK2021.SAU
SEWA ALAT BERAT DAN UPAH JASA KONSTRUKSI

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

SURVEI HARGA KEMAHALAN KONSTRUKSI

RAHASIA

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT			
1.	Provinsi		
2.	Kabupaten/Kota*)		
3.	Nama Responden		
4.	Alamat Responden		
5.	Nomor Telepon/HP		
6.	Kategori Responden	☐ Pedagang Grosir ☐ Produsen ☐ Pedagang Eceran ☐ Dinas PU atau SKPD Lainnya ☐ Jasa Penyewaan Alat Berat ☐ Pemborong/Kontraktor	

https://mukomuko.bps.go.id

BLOK II : KETERANGAN PETUGAS					
URAIAN		JULI 2021	OKTOBER 2021	JANUARI 2022	APRIL 2022
1.	Nama Pencacah				
2.	NIP Pencacah				
3.	Tanggal Pencacah				
4.	Tanda Tangan Pencacah				
5.	Nama Pengawas				
6.	NIP Pengawas				
7.	Tanggal Pengawas				
8.	Tanda Tangan Pengawas				

BLOK III : KETERANGAN RESPONDEN					
URAIAN		JULI 2021	OKTOBER 2021	JANUARI 2022	APRIL 2022
1.	Nama Pemberi Informasi				
2.	Tanda Tangan				

PENJELASAN

1. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data harga material, dan produk yang tersedia di lapangan yang identik dengan item yang dideskripsikan pada kuesioner dan buku pedoman.

2. Responden adalah pedagang grosir/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor/pedagang lain. Jika tidak ada pedagang grosir maka diperbolehkan produsen, pedagang campuran (grosir merangkap eceran), atau pedagang eceran.

3. Responden harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden sama untuk setiap periode pencacahan. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai.

4. Spesifikasi/kualitas barang dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merk barang yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan, cari kualitas yang setara.

5. Spesifikasi/kualitas barang setiap periode harus sama. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kualitas barang yang lama maka dicari pengganti yang setara.

6. Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas pencacah dan pemeriksa, dipindahkan ke komputer menggunakan program data entri online dari BPS RI (https://webentry.bps.go.id/shkk).

7. Dokumen yang sudah dientri disimpan di BPS Kabupaten/Kota untuk digunakan pada saat rekonsiliasi di BPS Provinsi.

https://mukomuko.bengkulu.bps.go.id

BLOK IV : DATA HARGA ASPAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Komoditas Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Merek	Harga per satuan Standar Juli 2021 (Rp)	Harga per satuan Standar Oktober 2021 (Rp)	Harga per satuan Standar Januari 2022 (Rp)	Harga per satuan Standar April 2022 (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aspal	Curah Grade 60/70	ton						
	Drum Grade 60/70 (155 kg)	drum						

BLOK V : DATA SEWA ALAT BERAT
(umur alat berat maksimal 8 tahun, tanpa operator, bahan bakar, dan mobilisasi)

Komoditas Barang	Kualitas Barang	Satuan/Unit (lingkari kode satuan/unit) (01) 1 BULAN (02) 200 JAM	Nilai Sewa per Satuan/Unit Juli 2021 (Rp)	Nilai Sewa per Satuan/Unit Oktober 2021 (Rp)	Nilai Sewa per Satuan/Unit Januari 2022 (Rp)	Nilai Sewa per Satuan/Unit April 2022 (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Excavator PC-200	Kapasitas bucket 0,8 m^3	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM					
	Kapasitas bucket 0,6 m^3	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM					
	Kapasitas bucket 0,4 m^3	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM					
Bulldozer D-65	Universal Blade (U-Blade)	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM					
	Straight Blade (S-Blade)	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM					
	Bowl Dozer	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM					
Loader (wheel atau track)	Kapasitas bucket 0,8 m^3	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM					
	Kapasitas bucket 0,6 m^3	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM					
	Kapasitas bucket 0,4 m^3	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM					
Tandem/ Vibrating Roller	8 – 10 ton	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM					
	Kurang dari 8 ton	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM					
Dump truck	Kapasitas 20 ton (tronton)	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM					
	Kapasitas 12 ton (engkel)	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM					
	Kapasitas 8 ton (colt diesel)	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM					
Motor Grader	≤ 100 HP	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM					
	> 100 HP	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM					
Asphalt Finisher	Kapasitas Hopper ≤ 10 Ton	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM					
	Kapasitas Hopper > 10 Ton	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM					
Generator Set	60 KVA	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM					
	40 KVA	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM					
	20 KVA	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM					

https://mukomukokab.bps.go.id

BLOK VI : JASA KONSTRUKSI
(tidak termasuk tunjangan lainnya seperti makan, rokok, minum, dan lainnya)

Komoditas Barang	Satuan/Unit	Upah per Satuan/Unit Juli 2021 (Rp)	Upah per Satuan/Unit Oktober 2021 (Rp)	Upah per Satuan/Unit Januari 2022 (Rp)	Upah per Satuan/Unit April 2022 (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Upah Kepala Tukang	O-H					
Upah Tukang Batu	O-H					
Upah Tukang Kayu	O-H					
Upah Instalatir Listrik	TITIK					
Upah Pembantu Tukang	O-H					
Upah Operator Alat Berat	O-H					

BLOK VII : CATATAN

https://mukomukokab.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://mukomukokab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUKOMUKO

Jl. Imam Bonjol, Komplek Pemda Mukomuko,
Telp (0737) 71633, Faks (0737) 71633,
Mailbox : bps1706@bps.go.id
Homepage : https://mukomukokab.bps.go.id/